

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2022**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Jl. A. Yani 152 C, Telp/Fax (031) 8292591 SURABAYA**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah.

Selaras dengan perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, perubahan Rencana kerja disusun sebagai acuan penyusunan rencana perubahan kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada PAPBD Tahun Anggaran 2022.

Dengan memohon Ridho Allah SWT, dan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, kami berharap agar seluruh target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II .....	7
2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	32
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>34</b>
3.1. Tujuan dan Sasaran	34
3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022	36
3.3. Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2022	52
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>67</b>



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menopang keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah serta rencana strategis perangkat daerah, dibutuhkan rencana kerja perangkat daerah yang sinergis dan harmonis dengan dokumen perencanaan daerah dimaksud;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, perlu menyesuaikan kembali pengaturan mengenai rencana kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan hukum yang ada, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan;
  - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. Penutup.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 49 SERI E



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan mengacu Perubahan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, KUPA-PPAS PAPBD 2022 dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, yang telah disusun sebagai perwujudan bentuk pelaksanaan teknis Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur yaitu ***Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong***, sedangkan Misi Pembangunan di Jawa Timur yaitu :

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, Partisipatoris memperkuat demokrasi kebangsaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.



Perubahan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode perubahan dalam tahun berjalan, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga sifat dari Perubahan Renja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Perubahan Target capaian kinerja pada Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 94 Seri E).
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2022, tanggal 22 Juli 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor 186 Tahun 2019, tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;

19. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor ..... Tahun 2022, tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai Panduan dalam penyusunan perubahan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program – program/Kegiatan dalam Perubahan RKPD dengan memperhatikan kelembagaan perangkat daerah dan pengaruh isu – isu strategis pada tahun 2022.

Sedangkan untuk Tujuannya adalah:

- a. Perubahan Renja menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Tugas, Pokok, dan Fungsi sesuai dengan Perubahan RKPD pada PAPBD TA 2022;
- b. Perubahan Renja merupakan dokumen yang berisikan Program – program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra dan Perubahan RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pedoman dalam penyusunan RKA PAPBD TA 2022.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### SISTEMATIKA PENULISAN

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran

3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II**

Kewenangan Urusan Wajib non pelayanan dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 didukung dengan alokasi anggaran APBD TA 2022 sebesar Rp 68.945.604.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 27.609.756.547,- (40,05 %). Sampai dengan Triwulan II pencapaian kinerja belum dapat terlihat secara utuh, sehingga yang dapat dilakukan evaluasi adalah pencapaian kerja/output kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian kinerja, hal ini dikarenakan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah merupakan suatu proses yang saling terkait mulai dari tahapan penyiapan, pelaksanaan, realisasi bantuan, sampai dengan technical assistance, sehingga capaian kinerja dapat dilihat pada akhir proses pemberdayaan.

Capaian output sampai dengan Triwulan II untuk masing – masing program/kegiatan yang mendukung kinerja utama PD adalah sebagai berikut :

#### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Pagu Anggaran Belanja untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 27.895.858.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 11.120.470.079,- (39,86 %) yang dipergunakan untuk pelaksanaan 7 Kegiatan dengan 27 Sub Kegiatan yaitu :

##### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 350.000.000,- realisasi sebesar Rp. 187.724.728,- atau 53,64 %. Dengan target kinerja output

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 dokumen terealisasi 33,33 %

2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 4.185.800,- atau 16,74 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen RKA sebanyak 1 dokumen dilaksanakan di triwulan berikutnya
  3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen RKA Perubahan sebanyak 1 dokumen dilaksanakan di triwulan berikutnya
  4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 3.334.000,- atau 13,34 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen DPA sebanyak 1 dokumen dilaksanakan di triwulan berikutnya
  5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi sebesar Rp. 900.000,- atau 3,60 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen DPA Perubahan sebanyak 1 dokumen dilaksanakan di triwulan berikutnya
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 100.000.000,- realisasi sebesar Rp. 24.649.200,- atau 24,65 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen capaian kinerja sebanyak 4 dokumen terealisasi 50 %
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 150.000.000,- realisasi sebesar Rp. 7.347.400,- atau 4,90 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen evaluasi kinerja sebanyak 4 dokumen terealisasi 25 %
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp. 19.046.769.000,- realisasi sebesar Rp. 7.075.431.537,- atau 37,15 %. Dengan target kinerja output Jumlah laporan



- pembayaran gaji dan tunjangan sebanyak 12 laporan terealisasi 50 %
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran Rp. 970.000.000,- realisasi sebesar Rp. 478.699.834,- atau 49,35 %. Dengan target kinerja output Jumlah laporan verifikasi penatausahaan sebanyak 12 laporan terealisasi 50 %
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran Rp. 43.000.000,- realisasi sebesar Rp. 26.332.000,- atau 61,24 %. Dengan target kinerja output Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah sebanyak 12 laporan terealisasi 50 %
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
dengan anggaran Rp. 37.000.000,- realisasi sebesar Rp. 23.864.350,- atau 64,50 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen keuangan SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi 100 %
  5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan anggaran Rp. 58.000.000,- realisasi sebesar Rp. 20.568.395,- atau 35,46 %. Dengan target kinerja output Jumlah dokumen tanggapan atas LHP sebanyak 1 laporan terealisasi 100 %
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp. 64.000.000,- realisasi sebesar Rp. 6.254.920,- atau 9,77 %. Dengan target kinerja output Jumlah laporan keuangan sebanyak 10 laporan terealisasi 100 %
  7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan anggaran Rp. 28.000.000,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Dengan target kinerja output Jumlah laporan prognosis sebanyak 1 laporan terealisasi 50 %

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran Rp. 176.790.000,- realisasi sebesar Rp. 58.198.200,- atau 32,92 %. Dengan target kinerja output Jumlah pengadaan pakaian dinas sebanyak 1 paket dilaksanakan di triwulan berikutnya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran Rp. 3.107.820.800,- realisasi sebesar Rp. 1.357.383.965,- atau 43,68 %. Dengan target kinerja output Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian sebanyak 4 laporan terealisasi 50 %

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp. 34.125.127,- realisasi sebesar Rp. 30.941.888,- atau 90,67 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket terealisasi 100 %
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 110.402.039,- realisasi sebesar Rp. 56.031.971,- atau 50,75 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket dilaksanakan di triwulan berikutnya
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran Rp. 133.735.797,- realisasi sebesar Rp. 60.217.147,- atau 45,03 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga sebanyak 1 paket dilaksanakan di triwulan berikutnya
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 335.430.812,- realisasi sebesar Rp. 169.661.200,- atau 50,58 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan sebanyak 1 paket dilaksanakan di triwulan berikutnya
5. Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran Rp. 50.260.177,- realisasi sebesar Rp. 48.170.559,- atau 95,84

- %.
- Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan bahan/material sebanyak 1 paket terealisasi 100 %
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Alat Besar dengan anggaran Rp. 0,- atau 0 %.  
Dengan target kinerja output Jumlah pengadaan alat besar sebanyak 0
  2. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan anggaran Rp. 0,- realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0 %. Dengan target kinerja output Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor sebanyak 0
  3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 53.001.210,- realisasi sebesar Rp. 50.836.500,- atau 95,92 %. Dengan target kinerja output Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya sebanyak 1 paket terealisasi 100 %
  4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 0,- atau 0 %  
Dengan target kinerja output Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 0
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 798.300.000,- realisasi sebesar Rp. 317.572.461,- atau 39,78 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebanyak 12 bulan terealisasi 50 %
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 60.264.234,- realisasi sebesar Rp. 3.250.000,- atau 5,39 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 1 paket dilaksanakan di triwulan berikutnya
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 1.412.908.804,- realisasi sebesar Rp. 782.435.621,- atau 55,38 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan

jasa pelayanan umum kantor sebanyak 1 paket terealisasi 100 %

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 425.050.000,- realisasi sebesar Rp. 243.414.618,- atau 57,27 %. Dengan target kinerja output Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebanyak 1 paket dilaksanakan di triwulan berikutnya
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 251.000.000,- realisasi sebesar Rp. 83.063.785,- atau 33,09 %. Dengan target kinerja output Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 1 paket dilaksanakan di triwulan berikutnya

**2) Program Penataan Desa**

Anggaran program sebesar Rp. 1.381.226.500,- dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 381.907.005,- (27,65 %), yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat

1. Fasilitasi Kab/Kota & Desa dlm rangka Penataan Desa dengan anggaran Rp. 1.381.226.500,- realisasi sebesar Rp. 381.907.005,- atau 27,65 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa yang difasilitasi Penataan desa sebanyak 9 desa terealisasi 44,44 %.

Selengkapnya capaian kerja output kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

### **3) Program Peningkatan Kerjasama Desa**

Anggaran program sebesar Rp. 2.754.556.000,- dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 1.206.128.893,- (43,79 %), yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 kegiatan dengan 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

1. Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga dengan anggaran sebesar Rp. 1.736.065.000,- realisasi sebesar Rp. 753.332.099,- atau 43,39 %. Dengan target kinerja output Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga sebanyak 3 kerjasama terealisasi 66,67 %

2. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.018.491.000,- realisasi sebesar Rp. 452.796.794,- atau 44,46 %. Dengan target kinerja output Jumlah kerjasama antar desa sebanyak 4 kerjasama terealisasi 50 %

Selengkapnya capaian kerja output kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

### **4) Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Anggaran program sebesar Rp. 24.150.688.750,- dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 10.063.883.165,- (41,67 %), yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 kegiatan dengan 10 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 409.900.000,- realisasi sebesar Rp. 160.848.200,- atau 39,24 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi desa sebanyak 9 desa terealisasi 66,67 %

2. Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.829.247.000,- realisasi sebesar Rp. 1.130.847.109,- atau 61,82 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa

yang telah difasilitasi sesuai dengan data desa center sebanyak 600 desa terealisasi 63,33 %

3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.364.735.000,- realisasi sebesar Rp. 1.286.318.750,- atau 38,23 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa sebanyak 30 desa terealisasi 53,33 %
4. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan anggaran sebesar Rp. 712.000.000,- realisasi sebesar Rp. 324.958.916,- atau 45,64 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa sebanyak 60 desa terealisasi 50 %
5. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 964.480.000,- realisasi sebesar Rp. 498.585.382,- atau 51,69 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan sebanyak 2.350 desa/kelurahan 190,64 %
6. Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 241.130.000,- realisasi sebesar Rp. 49.885.900,- atau 20,69 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry/update profil desa/kelurahan sebanyak 8.000 desa/kelurahan terealisasi 105,80 %
7. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp. 1.347.007.000,- realisasi sebesar Rp. 442.160.237,- atau 32,83 %. Dengan target kinerja output Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih sebanyak 210 aparatur dilaksanakan di triwulan berikutnya
8. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran sebesar Rp. 289.344.750,- realisasi sebesar Rp. 236.207.010,- atau 81,64 %. Dengan target kinerja output Jumlah anggota BPD yang dilatih sebanyak 80 orang terealisasi 75 %

9. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa dengan anggaran sebesar Rp. 11.020.300.000,- realisasi sebesar Rp. 4.369.456.078,- atau 39,65 %. Dengan target kinerja output Jumlah desa yang difasilitasi program desa berdaya sebanyak 152 desa dan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa sebanyak 6.014 KPM dilaksanakan di triwulan berikutnya

10. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa dengan anggaran sebesar Rp. 3.972.545.000,- realisasi sebesar Rp. 1.564.615.583,- atau 39,39 %. Dengan target kinerja output Jumlah BUM Desa yang di fasilitasi pembinaan sebanyak 201 BUMDesa terealisasi 3,48 %

Selengkapnya capaian kerja output kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

#### **5) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**

Anggaran program sebesar Rp. 12.763.274.750,- dan sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 4.837.367.405,- (37,90 %), yang dipergunakan untuk pelaksanaan 1 kegiatan dengan 8 Sub Kegiatan yaitu yaitu :

a. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

1. Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 423.539.500,- realisasi sebesar Rp. 135.750.819,- atau 32,05 %. Dengan target kinerja output Jumlah masyarakat adat yang berpotensi menjadi masyarakat hukum adat atau lembaga adat desa sebanyak 1 masyarakat adat dilaksanakan di triwulan berikutnya

2. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,



RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 1.057.662.000,- realisasi Rp. 356.926.042,- atau 33,75 %. Dengan target kinerja output Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaannya sebanyak 30 lembaga terealisasi 136,67 %.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar Rp. 1.018.491.000,- realisasi sebesar Rp. 568.913.063,- atau 55,86 %. Dengan target kinerja output Jumlah lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitas SDM sebanyak 30 lembaga adat terealisasi 96,67 %
4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan anggaran sebesar Rp. 4.044.174.000,- realisasi sebesar Rp. 1.524.416.371,- atau 37,69 %. Dengan target kinerja output Jumlah UEM yang dilatih peningkatan ketrampilan usaha sebanyak 900 UEM terealisasi 66,67 %
5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran sebesar Rp. 1.551.959.000,- realisasi sebesar Rp. 396.311.487,- atau 25,54 %. Dengan target kinerja output Jumlah pemanfaat TTG yang dilatih sebanyak 120 TTG terealisasi 70,83 %
6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 675.136.000,- realisasi sebesar Rp. 42.332.624,- atau 6,27 %. Dengan target kinerja output Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi BBGRM sebanyak 38 Kabupaten/Kota dilaksanakan di triwulan berikutnya
7. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 893.700.000,- realisasi sebesar Rp. 663.045.663,- atau 74,19

%. Dengan target kinerja output Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba sebanyak 120 orang terealisasi 120,83 %

8. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 3.098.613.250,- realisasi sebesar Rp. 1.149.671.336,- atau 37,10 %. Dengan target kinerja output Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM sebanyak 800 Kader PKK terealisasi 52,38 %

Selengkapnya capaian kerja output kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Matrik 16 Kolom.

## **PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Rincian APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sesuai dengan DPA APBD Provinsi Jawa Timur Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim Tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 68.945.604.000,-**
2. Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 1 program ex rutin yaitu (i) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan 4 program pembangunan yaitu (i) Program Penataan Desa; (ii) Program Peningkatan Kerjasama Desa; (iii) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan (iv) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Realisasi Anggaran untuk Belanja sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 27.609.756.547,- (40,05 %).

Selengkapnya untuk capaian target kinerja program, kegiatan dan realisasi anggaran program/kegiatan renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Jatim tahun 2022 sampai dengan Triwulan ke II, sebagaimana Tabel terlampir.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Tahun 2022  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>									
2.13.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>	<b>85</b>	100	85	100	117,65%	85%	85%	100%
		<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>95</b>	95,01	95	95,01	100,01%	95%	95%	100%
		<b>Indeks profesionalitas ASN</b>	<b>88</b>	70,184	70	70,184	100,26%	70%	70%	100%
<b>213.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>31</b>	7	7	7	1	7	1	14%
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	12	3	3	3	1	3	1	33%
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	4	1	1	1	1	1	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.01.1.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	16	4	4	4	1	4	2	50%
2.13.01.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	16	4	4	4	1	4	2	50%
<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>50%</b>
2.13.01.1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	48	12	12	12	1	12	6	50%
2.13.01.1.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	48	12	12	12	1	12	6	50%
2.13.01.1.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	48	12	12	12	1	12	6	50%
2.13.01.1.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	8	2	2	2	1	2	2	100%
2.13.01.1.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	4	1	1	1	1	1	1	100%
2.13.01.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	40	10	10	10	1	10	5	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	4	1	1	1	1	1	0	0%
<b>2.13.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	20	5	5	5	1	5	2	40%
2.13.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	16	4	4	4	1	4	2	50%
<b>2.13.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum	4	1	1	1	1	1	1	100%
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4	1	1	1	1	1	1	100%
2.13.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	4	1	1	1	1	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	1	1	1	1	1	1	100%
2.13.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan alat besar	4	0	0	0	0			
2.13.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	4	1	1	1	1			
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya	4	1	1	1	1	1	1	100%
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4	0	0	0	0			
2.13.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	1	1	1	1	1	1	100%
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48	12	12	12	1	12	3	25%
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	4	1	1	1	1	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	4	1	1	1	1	1	0	0%
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	1	1	1	1	1	0	0%
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>	<b>21,05</b>	11,76	<b>11,18</b>	11,76	56%		0,00	
		<b>Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>30,56</b>	0,00	0%
2.13.02.1.01	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi	20	5	5	5	25%		0	
		Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	11	0	0	0	0%	11	4	36%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan tertib administrasi sesuai perundang - undangan	7	7	7	7	100%		0	
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kab/Kota & Desa dlm rangka Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Penataan desa	9	0	0	0		9	4	44%
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase peningkatan kerjasama desa</b>	<b>21,05</b>	11,76	<b>11,18</b>	11,76	56%	<b>16,67%</b>	0,00	0%
2.13.03.1.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah desa yang dikerjasamakan	3	3	3	3	100%		0	
		Jumlah kawasan perdesaan	3	3	3	3	100%		0	
		Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	7	0		0	28,57%	7	4	57%
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga	6	3	3	3	67%	3	2	67%
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kerjasama antar desa	7	3	3	3	57,14%	4	2	50%
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa cepat berkembang	30	24,08	14	24,08	0,802667	20%	0	0%
		Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa		16,16	9	16,16	#DIV/0!	7%	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	90	82	90	82	0,911111		0	
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	7721	7721	7721	7721	1		0	
		Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60	60	60	60	1		0	
		Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	5210	5198	5210	5198	0,997697		0	
		Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	30	30	30	30	1		0	
		Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	20	0		0	0,15	20	6	30%
		Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	99	0		0	0,262626	99	49	49%
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	250	0		0	0,2	250	50	20%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
		Jumlah KPM yang memiliki usaha	6000	0		0	0	6.000	0	0%
		Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	3022	0		0	0	3.022	0	0%
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi desa sesuai regulasi	500	500	500	500	100,00%		0	
		Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi desa	9	0		0	0,00%	9	6	67%
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa	2600	7721	500	7721	2,969615			
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	7721	7721	7721	7721	1			
		Jumlah desa yang telah difasilitasi sesuai dengan data desa center	600	0		0	0,333333	600	380	63%
2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	60	30		30	0,633333	30	16	53%
2.13.04.1.01.06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	120	60		60	62,50%	60	30	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	4650	3620		3620	1,627312	2350	4480	191%
2.13.04.1.01.09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry/update pendataan	8200	8424	8000	8424	1,027317			
		Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry / update profil desa/kelurahan	8000				1,055625	8000	8464	106%
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang diberikan pembinaan	2700	82	90	82	0,03037			
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih						210	0	0%
2.13.04.1.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang diberikan pembinaan	420	60	60	60	0,142857		0	
		Jumlah anggota BPD yang dilatih						80	60	75%
2.13.04.1.01.13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang berdaya	604	151	161	151	0,25		0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang berdaya di perdesaan	25498	5198	5210	5198	0,203859		0	
		Jumlah desa yang difasilitasi program desa berdaya						152	1	1%
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa						6014	0	0%
2.13.04.1.01.15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi	802	202	202	202	0,25187		0	
		Jumlah BUM Desa yang di fasilitasi pembinaan						201		0%
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	55,31	37,57	36,36	37,57	0,679262		0,00	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif						3,73%		0%
		Persentase produk unggulan UEM						3,00%		0%
		Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif						5		0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi	114	114	114	114	1		0	
		Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	765	760	765	760	0,993464		0	
		Jumlah lembaga adat yang terbentuk	10	10	10	10	1		0	
		Jumlah KPM yang difasilitasi	80	90	80	90	1,125		0	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	60				1,016667	60	70	117%
		Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	100				0,6	100	130	130%
		Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	700				0	700	340	49%
		Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	30				1,133333	30	34	113%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
		Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	10				0,2	10	6	60%
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah masyarakat adat yang berpotensi menjadi masyarakat hukum adat atau lembaga adat desa	30	18		18	60,00%	1	0	0%
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi	798	190	114	190	23,81%		0	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaannya						30	41	137%
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat desa yang difasilitasi	260	34	30	34	0,130769		0	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
		Jumlah lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitas SDM						30	29	97%
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM	3130	62	60	62	1,98%		0	
		Jumlah UEM yang dilatih peningkatan ketrampilan usaha						900	600	67%
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemanfaatan TTG oleh masyarakat desa	428	8	8	8	1,87%		0	
		Jumlah pemanfaat TTG yang dilatih						120	85	71%
2.13.05.1.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi BBGRM	38	38		38	1	38	0	0%
2.13.05.1.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	360	60		60	35,28%	120	145	121%
		Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba		30	30	30			0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renja (%)
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi	3633	760	765	760	0,209194		0	
		Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM						800	419	52%

## 2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis, sehingga berdampak pada penurunan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan hasil renja tahun 2022 :

1. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan *outcome*, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan.

Beberapa permasalahan diatas perlu didukung antara lain dengan sinkronisasi program yang terpadu, penguatan kapasitas SDM dan lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan, pengambilan kebijakan – kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin menjadi hal yang penting dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin menuju keberdayaan dan kemandirian. Faktor strategis pada lingkungan organisasi yang dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi :

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based*

*development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat;

2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat;
3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.

Pentingnya Komitmen dan dukungan semua pihak untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi bagian penting dalam rangka mewujudkan keterpaduan program mengingat capaian kinerja yang sangat baik tentunya tidak terlepas dari dukungan perencanaan kinerja dan penganggaran yang sesuai dan akuntabel.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur serta kinerja pada tahun 2022 berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

3. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
4. Rencana Kerja Tahun 2022;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022;
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang didalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagaimana Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur.

Sedangkan Sasaran Jangka Menengah yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa.

Keterkaitan Tujuan dan sasaran strategis Selengkapny sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran

keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024, yaitu :

Tabel 3.2. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2022
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	86
2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	2 Persentase peningkatan status desa	11 %
3 Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	3 Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,44 %

### 3.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Berdasarkan Perubahan Rancangan RKPD Tahun 2022 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanggulangan kemiskinan dan sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tugas pokok dan fungsi PD yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Nomor ..... Tahun 2022, tanggal ..... 2022, rancangan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur selengkapnya sebagaimana Tabel 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				68.945.604.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				68.945.604.000	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase indikator program yang tercapai	85%	27.895.858.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase indikator program yang tercapai	85%	27.895.858.000	
			Persentase realisasi anggaran	95%				Persentase realisasi anggaran	95%		
			Indeks profesionalitas ASN	70%				Indeks profesionalitas ASN	70%		
213.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	7	700.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	7	700.000.000	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	350.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3	350.000.000	
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA	1	25.000.000	
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	25.000.000	
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA	1	25.000.000	
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	25.000.000	



KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.01.1.01 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen capaian kinerja	4	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen capaian kinerja	4	100.000.000	
2.13.01.1.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4	150.000.000	
<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jawa Timur	<b>Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	12	<b>20.246.769.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jawa Timur	<b>Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	12	<b>20.246.769.000</b>	
2.13.01.1.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	19.046.769.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	19.046.769.000	
2.13.01.1.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	970.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	970.000.000	
2.13.01.1.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12	43.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12	43.000.000	
2.13.01.1.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen keuangan SKPD	2	37.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen keuangan SKPD	2	37.000.000	
2.13.01.1.02 .06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1	58.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1	58.000.000	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.01.1.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan	10	64.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan	10	64.000.000	
2.13.01.1.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan prognosis	1	28.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah laporan prognosis	1	28.000.000	
<b>2.13.01.1.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	5	<b>3.284.610.800</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	5	<b>3.284.610.800</b>	
2.13.01.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas	1	176.790.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas	1	176.790.000	
2.13.01.1.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	4	3.107.820.800	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	4	3.107.820.800	
<b>2.13.01.1.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Administrasi Umum	1	<b>663.953.952</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Administrasi Umum	1	<b>663.953.952</b>	
2.13.01.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	34.125.127	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	34.125.127	
2.13.01.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	110.402.039	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	110.402.039	
2.13.01.1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1	133.735.797	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1	133.735.797	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1	335.430.812	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1	335.430.812	
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah penyediaan bahan/material	1	50.260.177	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah penyediaan bahan/material	1	50.260.177	
2.13.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	53.001.210	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	53.001.210	
2.13.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar		Jumlah pengadaan alat besar	0	0	Pengadaan Alat Besar		Jumlah pengadaan alat besar	0	0	
2.13.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	0	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	0	0	
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1	53.001.210	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1	53.001.210	
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	
2.13.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2.271.473.038	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	2.271.473.038	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	798.300.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	798.300.000	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	60.264.234	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1	60.264.234	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	1.412.908.804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	1.412.908.804	
2.13.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	676.050.000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jawa Timur	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	676.050.000	
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	425.050.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1	425.050.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	251.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	251.000.000	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>		1.381.226.500	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>		1.381.226.500	
			<b>Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa</b>	<b>30,56%</b>				<b>Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa</b>	<b>30,56%</b>		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.02.1.01	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jawa Timur	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi		1.381.226.500	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jawa Timur	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi		1.381.226.500	
			Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	11				Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	11		
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah desa binaan tertib administrasi sesuai perundang-undangan	0		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		Jumlah desa binaan tertib administrasi sesuai perundang-undangan	0		
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kab/Kota & Desa dlm rangka Penataan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi Penataan desa	9	1.381.226.500	Fasilitasi Kab/Kota & Desa dlm rangka Penataan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi Penataan desa	9	1.381.226.500	
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>		<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>		2.754.556.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>		<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>		2.754.556.000	
			<b>Persentase peningkatan kerjasama desa</b>	<b>16,67%</b>				<b>Persentase peningkatan kerjasama desa</b>	<b>16,67%</b>		
2.13.03.1.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jawa Timur	Jumlah desa yang dikerjasamakan		2.754.556.000	<b>Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jawa Timur	Jumlah desa yang dikerjasamakan		2.754.556.000	
			Jumlah kawasan perdesaan					Jumlah kawasan perdesaan			

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
			Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	7				Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	7		
2.13.03.1.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga	3	1.736.065.000	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga	3	1.736.065.000	
2.13.03.1.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah kerjasama antar desa	4	1.018.491.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah kerjasama antar desa	4	1.018.491.000	
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa cepat berkembang	20%	24.150.688.750	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Desa cepat berkembang	20%	24.150.688.750	
			Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	7%				Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	7%		
2.13.04.1.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jawa Timur	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pembinaan	210	24.150.688.750	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jawa Timur	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pembinaan	210	24.150.688.750	
			Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	7721				Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	7721		
			Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60				Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
			Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	5294				Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	5294		
			Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	30				Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	30		
			Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	20				Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	20		
			Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	99				Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	99		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	250				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	250		
			Jumlah KPM yang memiliki usaha	6.000				Jumlah KPM yang memiliki usaha	6.000		
			Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	3.022				Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	3.022		
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang tertib administrasi desa sesuai regulasi		409.900.000	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang tertib administrasi desa sesuai regulasi		409.900.000	
			Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi desa	9				Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi desa	9		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.04.1.01 .04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa		1.829.247.000	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa		Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa		1.829.247.000	
			Jumlah desa yang telah difasilitasi sesuai dengan data desa center	600				Jumlah desa yang telah difasilitasi sesuai dengan data desa center	600		
2.13.04.1.01 .05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	30	3.364.735.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	30	3.364.735.000	
2.13.04.1.01 .06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	60	712.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	60	712.000.000	
2.13.04.1.01 .08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	2.350	964.480.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	2.350	964.480.000	
2.13.04.1.01 .09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry/update pendataan		241.130.000	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry/update pendataan		241.130.000	



KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RPKD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
			Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry / update profil desa/kelurahan	8.000				Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry / update profil desa/kelurahan	8.000		
2.13.04.1.01 .10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang diberikan pembinaan		1.347.007.000	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang diberikan pembinaan		1.347.007.000	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih	210				Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih	210		
2.13.04.1.01 .11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah anggota BPD yang diberikan pembinaan		289.344.750	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah anggota BPD yang diberikan pembinaan		289.344.750	
			Jumlah anggota BPD yang dilatih	80				Jumlah anggota BPD yang dilatih	80		
2.13.04.1.01 .13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa		Jumlah desa yang berdaya		11.020.300.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa		Jumlah desa yang berdaya		11.020.300.000	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang berdaya di perdesaan					Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang berdaya di perdesaan			
			Jumlah desa yang difasilitasi program desa berdaya	152				Jumlah desa yang difasilitasi program desa berdaya	152		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa	6014				Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa	6014		
2.13.04.1.01 .15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi		3.972.545.000	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa		Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi		3.972.545.000	
			Jumlah BUM Desa yang di fasilitasi pembinaan	201				Jumlah BUM Desa yang di fasilitasi pembinaan	201		
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif		12.763.274.750	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif		12.763.274.750	
			Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,73%				Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,73%		
			Persentase produk unggulan UEM	3%				Persentase produk unggulan UEM	3%		
			Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	5				Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	5		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.05.1.01	<b>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jawa Timur	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi		12.763.274.750	<b>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jawa Timur	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi		12.763.274.750	
			Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi					Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi			
			Jumlah lembaga adat yang terbentuk					Jumlah lembaga adat yang terbentuk			
			Jumlah KPM yang difasilitasi					Jumlah KPM yang difasilitasi			
			Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	60				Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	60		
			Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	100				Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	100		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RPKD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
			Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	700				Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	700		
			Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	30				Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	30		
			Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	10				Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	10		
2.13.05.1.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah masyarakat adat yang berpotensi menjadi masyarakat hukum adat atau lembaga adat desa	1	423.539.500	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah masyarakat adat yang berpotensi menjadi masyarakat hukum adat atau lembaga adat desa	1	423.539.500	
2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi		1.057.662.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi		1.057.662.000	
			Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaannya	30				Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaannya	30		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKP					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah lembaga adat desa yang difasilitasi		1.018.491.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah lembaga adat desa yang difasilitasi		1.018.491.000	
			Jumlah lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitas SDM	30				Jumlah lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitas SDM	30		
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM		4.044.174.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM		4.044.174.000	
			Jumlah UEM yang dilatih peningkatan ketrampilan usaha	900				Jumlah UEM yang dilatih peningkatan ketrampilan usaha	900		
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Pemanfaatan TTG oleh masyarakat desa		1.551.959.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Pemanfaatan TTG oleh masyarakat desa		1.551.959.000	
			Jumlah pemanfaat TTG yang dilatih	120				Jumlah pemanfaat TTG yang dilatih	120		

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATATAN PENTING
2.13.05.1.01 .07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi BBGRM	38	675.136.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi BBGRM	38	675.136.000	
2.13.05.1.01 .08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	120	893.700.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	120	893.700.000	
2.13.05.1.01 .09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi		3.098.613.250	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi		3.098.613.250	
			Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	800				Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	800		

### 3.3. Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, dan Perubahan RKPD dimana dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari Visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah pembangunan Tahun 2019-2024 adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa.

Untuk mewujudkan tujuan dan mencapai target sasaran yang telah ditentukan, maka dilaksanakan program dan kegiatan. Pada Perubahan APBD Tahun 2022, pelaksanaannya dengan mempertimbangkan faktor efisiensi dan efektivitas serta prioritas kegiatan, sehingga dilakukan pergeseran anggaran untuk kode rekening belanja dalam kegiatan, antar kegiatan/program. Adapun sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana tabel 3.4. berikut :

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa	1 Persentase peningkatan status desa	1) Program Penataan Desa 2) Program Peningkatan kerjasama desa 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa	1 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat 2 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2 Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	2 Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Dalam upaya percepatan pengurangan kemiskinan di Jawa Timur yang diarahkan untuk mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin. Untuk meningkatkan kapasitas keberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program/kegiatannya diarahkan pada mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat aktif dalam pembangunan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat melalui program/kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sekaligus mendukung pencapaian Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam hal Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur. Selengkapnya rumusan rencana program dan kegiatan PD pada perubahan anggaran Tahun 2022 sebagaimana Tabel 3.5. Matriks berikut ini.



**TABEL 3.5. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  
PADA PERUBAHAN APBD TA 2022  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							72.911.185.000	68.945.604.000	(3.965.581.000)	APBD
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	85%		Persentase indikator program yang tercapai	85%		29.751.159.000	27.895.858.000	(1.855.301.000)	
		Persentase realisasi anggaran	95%		Persentase realisasi anggaran	95%					
		Indeks profesionalitas ASN	70%		Indeks profesionalitas ASN	70%					
213.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	7	Jawa Timur	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran Perangkat Daerah	7	Jawa Timur	700.000.000	700.000.000	-	
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3		350.000.000	350.000.000	-	
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1		Jumlah dokumen RKA	1		25.000.000	25.000.000	-	
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1		Jumlah dokumen RKA Perubahan	1		25.000.000	25.000.000	-	
2.13.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1		Jumlah dokumen DPA	1		25.000.000	25.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1		Jumlah dokumen DPA Perubahan	1		25.000.000	25.000.000	-	
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	4		Jumlah dokumen capaian kinerja	4		100.000.000	100.000.000		
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4		Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4		150.000.000	150.000.000	-	
<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>12</b>	Jawa Timur	<b>Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>12</b>	Jawa Timur	<b>22.102.070.000</b>	<b>20.246.769.000</b>	<b>(1.855.301.000)</b>	
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12		jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12		20.902.070.000	19.046.769.000	<b>(1.855.301.000)</b>	
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12		Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12		970.000.000	970.000.000	-	
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12		Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12		43.000.000	43.000.000	-	
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	2		Jumlah dokumen keuangan SKPD	2		37.000.000	37.000.000	-	
2.13.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1		jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1		58.000.000	58.000.000	-	
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	10		Jumlah laporan keuangan	10		64.000.000	64.000.000	-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.01.1.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1		Jumlah laporan prognosis	1		28.000.000	28.000.000	-	
<b>2.13.01.1.0 5</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	5	Jawa Timur	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	5	Jawa Timur	<b>2.568.054.760</b>	<b>3.284.610.800</b>	<b>716.556.040</b>	
2.13.01.1.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	1		Jumlah pengadaan pakaian dinas	1		221.400.000	176.790.000	<b>(44.610.000)</b>	
2.13.01.1.05 .03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	4		Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	4		2.346.654.760	3.107.820.800		
<b>2.13.01.1.0 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Administrasi Umum	1	Jawa Timur	Jumlah Administrasi Umum	1	Jawa Timur	<b>634.621.740</b>	<b>663.953.952</b>	<b>29.332.212</b>	
2.13.01.1.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1		Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1		34.510.000	34.125.127	<b>(384.873)</b>	
2.13.01.1.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1		jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1		108.693.500	110.402.039	<b>1.708.539</b>	
2.13.01.1.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	1		115.232.000	133.735.797		
2.13.01.1.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1		Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	1		339.286.240	335.430.812	<b>(3.855.428)</b>	
2.13.01.1.06 .07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan/material	1		Jumlah penyediaan bahan/material	1		36.900.000	50.260.177	<b>13.360.177</b>	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.01.1.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Jawa Timur	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Jawa Timur	763.000.000	53.001.210	(709.998.790)	
2.13.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan alat besar	0		Jumlah pengadaan alat besar	0		200.000.000	0	(200.000.000)	
2.13.01.1.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	0		Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	0		75.000.000	0	(75.000.000)	
2.13.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1		Jumlah pengadaan peralatan mesin dan lainnya	1		360.000.000	53.001.210	(306.998.790)	
2.13.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0		128.000.000	0	(128.000.000)	
2.13.01.1.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jawa Timur	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jawa Timur	2.361.971.000	2.271.473.038	(90.497.962)	
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12		710.016.000	798.300.000	88.284.000	
2.13.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1		Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1		66.000.000	60.264.234	(5.735.766)	
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1		1.585.955.000	1.412.908.804	(173.046.196)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.01.1.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jawa Timur	Jumlah Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jawa Timur	621.441.500	676.050.000	54.608.500	
2.13.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1		Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1		408.800.000	425.050.000	16.250.000	
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1		212.641.500	251.000.000	38.358.500	
<b>2.13.02</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>			<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>			1.500.000.000	1.381.226.500	(118.773.500)	
		<b>Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa</b>	<b>30,56%</b>		<b>Persentase desa yang di proses penetapan dalam penataan desa</b>	<b>30,56%</b>					
2.13.02.1.01	<b>Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat</b>	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi		Jawa Timur	Jumlah lembaga pengelola sarana prasarana yang difasilitasi		Jawa Timur	1.500.000.000	1.381.226.500	(118.773.500)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
		Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	11		Jumlah desa yang direkomendasikan proses penataan desa dan fasilitasi pelayanan pemerintahan desa	11					
2.13.02.1.01.04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah desa binaan tertib administrasi sesuai perundang-undangan	0		Jumlah desa binaan tertib administrasi sesuai perundang-undangan	0					
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kab/Kota & Desa dlm rangka Penataan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Penataan desa	9		Jumlah desa yang difasilitasi Penataan desa	9		1.500.000.000	1.381.226.500	(118.773.500)	
2.13.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>			<b>Persentase kerjasama desa, sarpras dan TTG yang difasilitasi di Jatim</b>			2.856.000.000	2.754.556.000	(101.444.000)	
		<b>Persentase peningkatan kerjasama desa</b>	<b>16,67%</b>		<b>Persentase peningkatan kerjasama desa</b>	<b>16,67%</b>					
2.13.03.1.01	<b>Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah desa yang dikerjasamakan		Jawa Timur	Jumlah desa yang dikerjasamakan		Jawa Timur	2.856.000.000	2.754.556.000	(101.444.000)	
		Jumlah kawasan perdesaan			Jumlah kawasan perdesaan						
		Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	7		Jumlah kerjasama desa yang dilakukan antar desa dan pihak ketiga	7					

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.03.1.01 .02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga	3		Jumlah kerja sama dengan pihak ketiga	3		1.800.000.000	1.736.065.000		
2.13.03.1.01 .03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kerjasama antar desa	4		Jumlah kerjasama antar desa	4		1.056.000.000	1.018.491.000		
2.13.04	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase Desa cepat berkembang	20%		Persentase Desa cepat berkembang	20%		25.337.026.000	24.150.688.750		
		Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	7%		Persentase desa yang melaksanakan kewenangan provinsi terkait pemberdayaan usaha ekonomi desa	7%				-	
2.13.04.1.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pembinaan	210	Jawa Timur	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang diberikan pembinaan	210	Jawa Timur	25.337.026.000	24.150.688.750	(1.186.337.250)	
		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	7721		Jumlah desa yang difasilitasi dalam pengelolaan dana desa	7721				-	
		Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60		Jumlah desa yang tertib pengelolaan administrasi dan aset desa	60				-	
		Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	5294		Jumlah Rumah Tangga Miskin yang berdaya di perdesaan	5294				-	
		Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	30		Jumlah BUMDesa yang terbentuk dan yang naik status	30				-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
		Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	20		Jumlah desa yang dibina dalam menjalankan manajemen pemerintahan desa	20				-	
		Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	99		Jumlah desa yang tertib penatausahaan keuangan dan aset desa	99				-	
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	250		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa dan BPD yang meningkat kapasitas SDM	250				-	
		Jumlah KPM yang memiliki usaha	6.000		Jumlah KPM yang memiliki usaha	6.000				-	
		Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	3.022		Jumlah BUM Desa yang berkembang dan maju di jatim	3.022				-	
2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang tertib administrasi desa sesuai regulasi			Jumlah desa yang tertib administrasi desa sesuai regulasi			425.000.000	409.900.000	(15.100.000)	
		Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi desa	9	Jawa Timur	Jumlah desa yang difasilitasi pembinaan administrasi desa	9	Jawa Timur			-	
2.13.04.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa			Jumlah desa yang telah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa			1.956.000.000	1.829.247.000	(126.753.000)	
		Jumlah desa yang telah difasilitasi sesuai dengan data desa center	600		Jumlah desa yang telah difasilitasi sesuai dengan data desa center	600					



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.04.1.01 .05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	30		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	30		3.574.256.000	3.364.735.000	(209.521.000)	
2.13.04.1.01 .06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	60		Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan aset desa	60		712.000.000	712.000.000	-	
2.13.04.1.01 .08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	2.350		Jumlah desa/kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan desa/kelurahan	2.350		1.000.000.000	964.480.000	(35.520.000)	
2.13.04.1.01 .09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry/update pendataan			Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry/update pendataan			250.000.000	241.130.000	(8.870.000)	
		Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry / update profil desa/kelurahan	8.000		Jumlah desa/kelurahan yang telah melakukan entry / update profil desa/kelurahan	8.000					
2.13.04.1.01 .10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang diberikan pembinaan			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang diberikan pembinaan			1.456.000.000	1.347.007.000	(108.993.000)	
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih	210		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dilatih	210				-	
2.13.04.1.01 .11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang diberikan pembinaan			Jumlah anggota BPD yang diberikan pembinaan			300.000.000	289.344.750	(10.655.250)	
		Jumlah anggota BPD yang dilatih	80		Jumlah anggota BPD yang dilatih	80				-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.04.1.01 .13	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang berdaya			Jumlah desa yang berdaya			11.485.539.000	11.020.300.000	(465.239.000)	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang berdaya di perdesaan			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang berdaya di perdesaan					-	
		Jumlah desa yang difasilitasi program desa berdaya	152		Jumlah desa yang difasilitasi program desa berdaya	152				-	
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa	6014		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang difasilitasi program jatim puspa	6014				-	
2.13.04.1.01 .15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi			Jumlah BUM Desa yang terfasilitasi			4.178.231.000	3.972.545.000	(205.686.000)	
		Jumlah BUM Desa yang di fasilitasi pembinaan	201		Jumlah BUM Desa yang di fasilitasi pembinaan	201				-	
2.13.05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif			Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif			13.467.000.000	12.763.274.750	(703.725.250)	
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,73%		Persentase lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,73%				-	
		Persentase produk unggulan UEM	3%		Persentase produk unggulan UEM	3%				-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
		Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	5		Jumlah lembaga pengelola TTG yang aktif	5				-	
2.13.05.1.01	<b>Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi		Jawa Timur	Jumlah LPMD/K, Posyandu, PKK, Karang Taruna yang difasilitasi		Jawa Timur	13.467.000.000	12.763.274.750	(703.725.250)	
		Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi			Jumlah pengurus TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi					-	
		Jumlah lembaga adat yang terbentuk			Jumlah lembaga adat yang terbentuk					-	
		Jumlah KPM yang difasilitasi			Jumlah KPM yang difasilitasi					-	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	60		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang difasilitasi	60				-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
		Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	100		Jumlah kader yang terlatih dalam penanganan trantib, siaga bencana dan narkoba	100				-	
		Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	700		Jumlah kader pkk yang meningkat kapasitas SDM	700				-	
		Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	30		Jumlah produk UEM yang difasilitasi pemasaran online/pihak ketiga	30				-	
		Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	10		Jumlah lembaga pengelola TTG yang difasilitasi	10				-	
2.13.05.1.01 .01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah masyarakat adat yang berpotensi menjadi masyarakat hukum adat atau lembaga adat desa	1		Jumlah masyarakat adat yang berpotensi menjadi masyarakat hukum adat atau lembaga adat desa	1		490.000.000	423.539.500	(66.460.500)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.05.1.01 .02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi			Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi			1.156.000.000	1.057.662.000	(98.338.000)	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaannya	30		Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaannya	30				-	
2.13.05.1.01 .03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat desa yang difasilitasi			Jumlah lembaga adat desa yang difasilitasi			1.056.000.000	1.018.491.000	(37.509.000)	
		Jumlah lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitas SDM	30		Jumlah lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitas SDM	30				-	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
2.13.05.1.01 .05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM			Jumlah desa yang difasilitasi pengembangan UEM			4.252.500.000	4.044.174.000	(208.326.000)	
		Jumlah UEM yang dilatih peningkatan ketrampilan usaha	900		Jumlah UEM yang dilatih peningkatan ketrampilan usaha	900				-	
2.13.05.1.01 .06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pemanfaatan TTG oleh masyarakat desa			Jumlah Pemanfaatan TTG oleh masyarakat desa			1.668.500.000	1.551.959.000	(116.541.000)	
		Jumlah pemanfaat TTG yang dilatih	120		Jumlah pemanfaat TTG yang dilatih	120				-	
2.13.05.1.01 .07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi BBGRM	38		Jumlah Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi BBGRM	38		700.000.000	675.136.000	(24.864.000)	
2.13.05.1.01 .08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	120		Jumlah Kader yang difasilitasi untuk ketentraman, ketertiban, siaga bencana dan bersih narkoba	120		986.000.000	893.700.000	(92.300.000)	
2.13.05.1.01 .09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi			Jumlah TP PKK Kabupaten/Kota yang difasilitasi			3.158.000.000	3.098.613.250	(59.386.750)	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/INDIKATOR KELUARAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
		Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	800		Jumlah kader pkk kab/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM	800				-	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

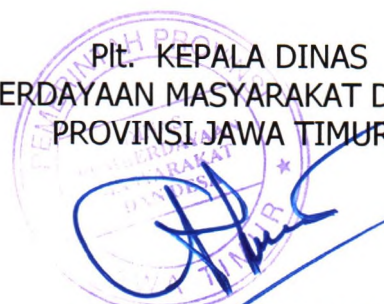
Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada PAPBD Tahun Anggaran 2022 menjadi sangat strategis artinya dalam rangka mensinkronkan perubahan – perubahan kebijakan program pembangunan yang disesuaikan dengan asumsi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan dalam Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022 berfungsi pula sebagai sarana acuan pencapaian target kinerja pada seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Perubahan Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sehingga akan memperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang.

Surabaya, Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI JAWA TIMUR

The image shows a circular official stamp of the Provincial Office of Community Empowerment and Village Development of East Java. The stamp contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR' and 'DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

**SOEKARYO, SH, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19620717 199503 1 003